

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam demokrasi saat ini untuk setiap pemerintah dalam pengelolaan suatu negara membutuhkan dana yang cukup besar jumlahnya. Sehingga pemerintah dituntut untuk semakin transparan serta akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan yang cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan suatu pemerintahan. Dengan adanya suatu pengawasan yang cukup andal, diharapkan dapat menjamin pendistribusian yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa di pertanggungjawabkan. Hasil audit juga memberikan informasi mengenai setiap potensi kerugian kepada negara yang ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan efisiensi penggunaan APBN dan APBD oleh aparat yang tidak bertanggungjawab. Menurut Hardiningsih, Pancawati dan Rachmawati Meita Oktaviani (2012), kualitas audit merupakan hal yang sangat penting, karena dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung oleh audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit

sektor publik rendah akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintahan untuk melakukan penyimpanan penggunaan anggaran. Auditor pemerintah daerah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwiltrop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK serata BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang sekarang ini lebih dipopulerkan dengan sebutan Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, dimana memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat di lingkungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Menurut Falah (2005) dalam Nugroho (2012), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Kualitas hasil kerja auditor berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah di tetapkan. Untuk auditor sendiri, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan dinilai seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap

pekerjaan audit yang diselesaikan menurut Tan dan Alison (1999) dalam Maburri dan Winarna (2010).

Menurut Mardiasmo (2005) dalam Ayuningtyas dan Pamudji (2012), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tidak mudah untuk menjaga independensi, obyektivitas dan integritas seorang auditor. Pengalaman kerja, *due professional care* serta kepatuhan dalam kode etik pun yang melekat pada diri auditor bukan sebagai jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil audit pemeriksaannya.

Pemilihan studi kasus ini menggunakan berbagai pertimbangan, karena banyaknya opini masyarakat tentang bagaimana kualitas audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan melihat fenomena rendahnya kualitas hasil audit yang dihasilkan oleh auditor yang disebabkan karena

ketidapatuhan auditor terhadap standar audit yang berlaku. Pentingnya didalam penelitian ini memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemegang kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat.

Penelitian ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarma (2010) dengan waktu, objek, serta variabel yang berbeda namun alat analisis yang digunakan adalah sama. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian kali ini peneliti mengambil judul: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali)”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh obyektifitas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?

3. Apakah terdapat pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
5. Apakah terdapat pengaruh etika auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
6. Apakah terdapat pengaruh *due professional care* auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka untuk tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh independensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh obyektifitas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji apakah ada pengaruh integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji apakah ada pengaruh etika auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
6. Untuk menguji apakah ada pengaruh *due professional care* terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi peneliti

Meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi peneliti, dan dapat menambah wawasan khususnya tentang pengetahuan audit yang berkualitas dan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seperti independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, integritas, kepatuhan etika, dan *due professional care* serta berbagai masalah yang melengkapinya.

2. Bagi akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan informasi tambahan bagi para mahasiswa dan diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran .

3. Bagi Inspektorat

Sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Sehingga inspektorat di harapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini. Penulis membaginya ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis .

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; data dan data sumber data; teknik pengumpulan data; definisi operasional variabel dan pengukuran variabel; dan metode analisis data (mencakup statistik deskriptif data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis).

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan proses penganalisaan data yang meliputi prosedur penentuan sampel penelitian, analisis data, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan pembahasan. Dalam bab ini juga dijelaskan dan dibandingkan pula hasil yang diperoleh dari penelitian yang sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.